KEKERASAN DAN KONFLIK DI PAPUA: AKAR MASALAH DAN STRATEGI MENGATASINYA[1]

Yoseph Yapi Taum

Dosen Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Sastra, Universitas Sanata Dharma
Alamat korespondensi: Kampus II Jl. Affandi, Mrican Tromol Pos 29 Yogyakarta
Email: *yoseph1612@yahoo.com*

ABSTRACT

Up until now, West Papua still categorized as a conflict region of Indonesia. History of violence and conflict in Papua were complicated and continuing for years. Endeavor to finish all violence and conflict in Papua, for examples, with physical and social development, special authonomy (otonomi khusus) and extended region (pemekaran wilayah) never meet the final and permanent solution. The question is, what actually the root problem of the violence and conflict in Papua? How to pave the road in creating a culture of peace and harmony in Papua? This paper try to answer these questions, based on the perspective of the roots cause of conflict and violence and conflict resolution. This study aims at designing a model for educating values of integrity and harmony among people. The model is constructed based on artifact, mentifact, dan sociofact of Papua society. Following the deep understanding of the root cause of violence and conflict in Papua, this paper finally propose three strategies for final and permanen solutions for Papua, i.e (1) historical justice; (2) memoria passionis; dan (3) reconstruction of Papuan identity.

Keywords: *konflik dan kekerasan, model pendidikan nilai, integrasi dan keharmonisan, historical justice, memoria passionis, reconstruction of Papuan identity.*

1. PENDAHULUAN

Persoalan kekerasan, konflik, bahkan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) merupakan sebuah issu akademis yang mendapat perhatian yang luas. Abad ke-20 dikenal sebagai abad geosida *(the century of genocide)*, yaitu abad di mana umat manusia menghadapi sebuah gejala peradaban yang mencengangkan, yaitu pembantaian manusia dalam junlah yang sangat besar oleh sesamanya sendiri. Sekalipun umat manusia sudah melangkah ke abad ke-21, tampaknya tata dunia baru tidak banyak berubah. Konflik, kekerasan, dan pembantaian atas nama suku, agama, dan ras masih belum berakhir. Manusia tidak cukup belajar dari semua kesedihan, penderitaan, dan darah yang tumpah sia-sia.

Bangsa Indonesia sebagai sebuah bangsa yang besar tak luput dari sejarah panjang yang menyangkut konflik, kekerasan, dan pembantaian sesama anak bangsa dengan berbagai alasan. Tragedi 1965 merupakan tragedi terbesar dalam sejarah kelam bangsa ini. Selanjutnya berbagai konlik, kekerasan, dan pembantaian terus terjadi di berbagai wilayah di tanah air, seperti di Ambon, Poso, Aceh, Lombok, Probolinggo, dan Papua.

Di dunia internasional, wilayah Papua Barat *(West Papua)* dipandang sudah berintegrasi secara sah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sejak 1969 –setelah pelaksanaan Pepera yang mendapat pengakuan 84 negara dan disahkan melalui resolusi PBB No. 2504/XXIV/1969. Akan tetapi, sampai saat ini, wilayah itu masih terus bergejolak. Pembangunan di kawasan ini belum sepenuhnya mengikis kekerasan dan berbagai konflik termasuk tradisi kehidupan tribalisme masyarakatnya. Konflik, friksi, dan perang antar-suku yang berulang kali terjadi di Papua, yang seringkali ditayangkan melalui berbagai media massa, baik media massa nasional maupun internasional menunjukkan secara jelas bahwa Indonesia tidak memiliki sebuah strategi kebudayaan yang jelas untuk membangun integritas dan keharmonisan masyarakatnya. Kondisi ini tentu akan berpengaruh pada pembentukan citra Indonesia di luar negeri, karena di Papua terdapat perusahaan tambang raksasa Freeport di mana kepentingan kapitalisme global menjadi sangat dominan. Persoalan separatisme yang terwujud dalam berbagai organisasi dan gerakan masyarakat Papua tampak semakin menguat. Jika kita tidak mulai membenahi

keharmonisan kehidupan masyarakatnya, dikhawatirkan bahwa kondisi kehidupan sosial budaya di Papua akan semakin terpuruk.

Propinsi Papua dihuni oleh sekitar 220-an kelompok suku bangsa (etnis) dengan bahasa yang berbeda-beda, yang bentuk wilayah penyebarannya secara ekologis, geografis, dan historis berbeda-beda antara wilayah pesisir pantai dan lembah, danau, pegunungan, dan kepulauan. Keadaan ekologis-geografis ini menyebabkan tiap-tiap kelompok etnis mempunyai batas-batas wilayah, bahasa, dan budaya yang secara ekologis, linguistik, dan etnografis yang berpengaruh terhadap tatanan sosial, politik, dan ekonomi masyarakatnya (Pattipi, 1993: 1). Kondisi semacam ini menimbulkan adanya perbedaan (mendasar) di antara kelompok-kelompok etnis, baik dalam memahami (akar) persoalan di Papua, maupun mempertahankan ataupun memperebutkan kepentingan-kepentingan tertentu. Selain merupakan sebuah kekayaan, kemajemukan di wilayah ini tidak jarang menimbulkan konflik, friksi, bahkan perang suku berkepanjangan.

Sampai saat ini Propinsi Papua (Irian Jaya) masih diberi label sebagai daerah konflik, bahkan juga tercatat sebagai daerah konflik bernuansa kekerasan terlama di Indonesia (Elisabeth, 2005: 1). Mukesh Kapila (2002: 12) yang mengkaji konflik di beberapa negara termasuk Kyrgyzstan, Moldova, Uganda, dan Sri Langka mengatakan konflik bernuansa kekerasan terjadi karena adanya perbedaan pemahaman, kepentingan, dan ideologi di antara para aktor. Konflik di Papua, berdasarkan hasil penelitian LIPI (2004), disebabkan oleh adanya perbedaan mendasar di antara pihak-pihak yang berkonflik, baik dalam memahami akar persoalan di Papua, mempertahankan atau memperebutkan kepentingan-kepentingan tertentu.

Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah bertekat mengintensifkan penyelesaian konflik di Papua dengan menjadikannya sebagai salah satu prioritas utama kebijakan pemerintah di bidang politik dan keamanan (Tempo Interaktif, 7/1/2003). Penyelesaian konflik Papua yang dilaksanakan oleh pemerintah diprioritaskan pada langkah diplomasi luar negeri serta penyelesaian masalah keadilan, terutama di bidang kesejahteraan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa konflik dan kekerasan itu tidak juga berakhir.

Universitas sebagai lembaga pendidikan tinggi diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata terhadap pemerintah dalam upayanya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di tanah ini. Papua merupakan sebuah *field of reading* yang perlu mendapat perhatian lembaga perguruan tinggi. Konflik dan kekerasan di Papua telah berlangsung sedemikian lama dan memiliki sejarah yang panjang dan kini berkembang menjadi semakin kompleks. Karena itu, penyelesaian melalui pendekatan diplomasi dan pendekatan ekonomi saja, seperti yang dilakukan pemerintah SBY, dipandang masih perlu dilengkapi dengan pendekatan budaya (Kristiawan, 2005).

Untuk menghasilkan solusi yang komprehensif mengenai Papua, jalan ekonomi dan jalan politik perlu dibarengi dengan jalan dan pendekatan kultural. Studi ini dimaksudkan sebagai sebuah langkah strategis untuk berpartisipasi memberikan kontribusi bagi penyelesaian konflik dan kekerasan di Papua melalui studi pustaka, observasi lapangan, dan wawancara.

2. LANDASAN TEORI

Topik tentang konflik dan kekerasan dalam masyarakat Indonesia merupakan sebuah bahan kajian akademis *(scholarly discussion)* yang mulai berkembang pesat sejak tahun 2001. Karya-karya yang selalu dijadikan bahan acuan antara lain Benedict Anderson (ed), *Violence and the State in Suharto's Indonesia* (Ithaca, Cornell Southeast Asia Program 2001); Freek Colombijn dan J. Thomas (eds.), *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective* (Leiden, KITVL Press 2002); Charles Coppel (ed.), *Violence Conflict in Indonesia: Analysis, Representation and Solution* (Richmond, Curzon forthcoming); Inggrid Wessel dan Georgia Wimhõfer (eds.), *Violence in Indonesia* (Hamburg, Abera, 2001). Karya-karya sebelumnya yang juga banyak dijadikan acuan antara lain John E. Carr dan Eng Kok Tan "In Search of the True *Amok* as Viewed within the Malay Culture," dalam *American Journal of Psychiatry* (1976); Robert Cribb, *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949* (Sydney: Allen and Unwin, 1991); dan Geoffrey Robinson, *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali* (Ithaca and London: Cornell University Press, 1995).

Dari berbagai perspektif akademis itu, kita dapat mengklasifikasikan tiga model pendekatan yang mencoba menjelaskan akar budaya kekerasan di tanah air. Kelompok pertama, akademisi yang menyoroti akar kekerasan dalam konflik-konflik tertentu, misalnya,

konflik Aceh, konflik Papua, dan konflik Ambon. Analisis terhadap kasus-kasus konflik itu mungkin dapat menghasilkan banyak penjelasan, tetapi tidak dapat memberikan pemahaman, misalnya, mengapa orang Aceh dan orang Papua memilih jalan kekerasan untuk mengatasi masalahnya dengan Jakarta. Analisis semacam ini sebenarnya gagal menjelaskan mengapa begitu banyak kekerasan muncul hampir bersamaan di berbagai daerah di Nusantara.

Kelompok kedua cenderung menganggap kekerasan di Indonesia merupakan warisan regim Orde Baru pimpinan mantan Presiden Soeharto. Kelompok ini memiliki tiga argumen dasar: (1) negara dan militer cenderung melindungi pelaku-pelaku kejahatan kemanusiaan; (2) negara gagal menggunakan haknya yang legal untuk melakukan kekerasan dan gagal melarang kelompok sipil menggunakannya; dan (3) negara menciptakan disparitas dan ketidakadilan ekonomi yang mudah menyulut konflik. Ada banyak hal yang benar dalam model analisis semacam ini, tetapi terlalu mudah membebani semuanya pada pundak Soeharto dan regimnya. Lagi pula ada banyak kekerasan yang menelan korban jiwa yang terjadi sebelum Soeharto berkuasa.

Kelompok ketiga memusatkan perhatiannya pada kontinuitas kekerasan dan produksi budaya. Kekerasan diduga disebabkan karena adanya budaya *amok*. *Amok* mengacu pada kekuatan impersonal di luar kontrol manusia dan tidak menjadi tanggung jawab individu tertentu. Pandangan semacam ini sebenarnya kontradiktif dengan produk budaya populer lainnya, yaitu semangat hidup harmonis yang ada dalam berbagai budaya nusantara. Kalau *amok* benar merupakan faktor utama kekerasan, mengapa banyak orang Indonesia yang hidup dalam suasana tertekan dapat mengatasi masalahnya dengan damai?

Analisis kesejarahan merupakan sebuah pendekatan lain dalam memahami akar budaya kekerasan di Indonesia. Pandangan ini dimotori oleh beberapa Indonesianis, termasuk Henk Schulte Nordholt yang menelurusi *"genealogy of violence"* sejak zaman kolonial, bahkan juga sebelum periode kolonial. Baginya, konflik-konflik kedaerahan, agama, etnik, dan sosial di Indonesia memiliki akar historis yang panjang dan mendalam.

Nordholt menggambarkan negara kolonial sebagai sebuah regim ketakutan *(regime of fear)* yang menjadi sponsor bagi banyak tindak kekerasan, termasuk penghilangan para kriminal kecil *(lynching of petty criminals)*. William Frederick menunjukkan kekerasan yang terjadi selama revolusi (1945-1949) yang secara sadar dieksploitasi oleh militer dan pemimpin-pemimpin politik kita. Hermawan Sulistyo membuktikannya melalui bukunya yang terkenal *Palu Arit di Ladang Tebu: Sejarah Pembantaian Massal yang Terlupakan* (Jakarta: Gramedia, 2000). Geoffrey Robinson menunjukkan hal yang sama di Bali. Dalam berbagai kasus itu selalu tampak apa yang oleh William H. Frederick disebut sebagai *"shadows of an unseen hand"* (bayangan-bayangan tangan yang tak kelihatan). Regim ketakutan itu juga tampak selama pemerintahan Orde Baru. Regim ini tidak saja menghancurkan ideologi tertentu tetapi juga memerangi setiap orang yang menganut ideologi yang berbeda. Mereka juga melaksanakan operasi *lynching of petty criminals* yang dikenal sebagai penembakan misterius.

Semua tindakan kekerasan itu dipandang sebagai sarana yang sahih *(legitimate means)* untuk menyelesaikan masalah. Orang-orang yang 'bermasalah' itu secara sosiologis dikonstruksi sebagai *outsiders,* dan diberi berbagai stigma seperti pengkhianat bangsa, pengkhianat pancasila, mata-mata musuh, manikebuis, anti-revolusi, atheis, gabungan anak liar, gerakan pengacau keamanan, penjual kehormatan bangsa, dan lain-lain. Mereka secara sahih boleh 'dihabisi' oleh negara dan kelompok masyarakat *'insiders.'* Bagi kita, kekerasan sahih dilakukan kepada kelompok di luar kita. Kelompok di luar ini kita pandang bukan sebagai makhluk manusia yang dilindungi hukum. Hukum tidak berlaku bagi mereka.

"It is important for us," tulis Dharmendra Yadav dalam ISEAS News April 2008, *"that we should grow up with a better sense of our history."* Dalam kasus Papua, faktor sejarah dekolonisasi dari pemerintahan Belanda menuju pemerintahan RI perlu dipahami secara jujur dan terbuka. Apa yang diperlihatkan secara jelas oleh sejarah merupakan sebuah pelajaran yang tak ternilai harganya. Konflik dan kekerasan yang tak pernah berakhir di bumi Papua sejak proses dekolonisasi sampai dengan saat ini menunjukkan bahwa kekerasan benar-benar ada dalam wacana sosial-politik Indonesia.

Untuk mengatasi persoalan konflik dan kekerasan yang terjadi di sebuah wilayah, dibutuhkan pemahaman yang mendalam mengenai akar masalahnya. Upaya ini dapat dilaksanakan dengan membicarakan dan mendiskusikan secara lebih terbuka berbagai persoalan yang menyangkut motif atau ideologi konflik. Resolusi konflik, atau yang dikenal juga dengan istilah rekonsiliasi, adalah sebuah cara dan proses membangun perdamaian dan mengakhiri pertikaian.

Untuk menemukan jalan penyelesaian yang permanen, dibutuhkan sebuah strategi kebudayaan yang komprehensif. Suatu bangsa yang telah memiliki strategi kebudayaan, berarti memiliki panduan dalam gerak proses modernisasi dan pembangunan hingga mampu menjaga dan memperkuat kepribadian nasional, kontinuitas kebudayaan, dan kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri, serta sekaligus juga memperkuat kesatuan nasionalnya. Keharmonisan dan integrasi berbagai komunitas masyarat yang hidup berdampingan dalam sebuah wilayah bangsa harus terus-menerus diupayakan dan diperjuangkan.

3. TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Konflik dan kekerasan di Papua sudah menjadi semacam benang kusut yang telah berlangsung puluhan tahun. Berdasarkan kerangka teori di atas, akar kekerasan dan konflik di Papua perlu dirunut ke dalam sejarah Papua *(genealogy of violence)* sejak proses dekolonisasi. Upaya menghentikan konflik dan kekerasan di bumi Papua bukanlah jalan yang murah dan mudah. Ia perlu diperjuangkan dengan kerja keras yang 'berkeringat' dan strategi akademis yang melibatkan semua pihak, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Dalam buku *Papua Road Map, Negotiating the Past, Improving the Present, and Securing the Future,* Tim Peneliti dari LIPI (2008) mengungkap empat sumber konflik di Papua, yakni: (1) Marjinalisasi dan diskriminasi yang dirasakan oleh orang asli Papua sebagai akibat pembangunan ekonomi, kebijakan budaya dan migrasi massal di Papua sejak 1970 hingga hari ini. (2) kegagalan pembangunan; (3) kontradiksi pemahaman sejarah integrasi dan konstruksi identitas politik di antara Papua dan Jakarta: kaum nasionalis Indonesia yang berpendirian bahwa NKRI adalah prinsip dan format politik yang final versus nasionalis Papua yang berpendirian bahwa integrasi Papua ke dalam Indonesia tidak *legitimate* karena "bangsa dan negara Papua telah terbentuk dan berdiri sejak 1 Desember 1961" dan oleh karena itu menuntut pengembalian "kedaulatan dan kemerdekaan" Papua; dan (4) sejarah panjang kekerasan politik di Papua, terutama yang dilakukan oleh aktor negara terhadap warga negara Indonesia di Papua.

Pikiran-pikiran yang tertuang dalam kajian komprehensif yang dilakukan Tim Peneliti LIPI tersebut sangat bernilai untuk memahami akar masalah kekerasan dan konflik di Papua. Untuk mengatasi berbagai konflik dan kekerasan di Papua, diperlukan sebuah strategi kebudayaan untuk menemukan sebuah solusi yang adil dan permanen. Dalam pandangan penulis, sekurang-kurangnya dibutuhkan tiga fundasi sebagai strategi kebudayaan untuk mengatasi konflik dan kekerasan di Papua, yaitu *(1) historical justice; (2) memoria passionis;* dan *(3) reconstruction of Papuan identity.* Ini adalah tiga agenda yang akan dicarikan jalan keluar untuk menjawabnya dengan melibatkan berbagai kearifan lokal orang Papua sendiri. Kekerasan dan konflik yang berbau politis, SARA, dan ekonomis perlu dihentikan secara total di bumi Papua, jika Papua masih kita anggap sebagai bagian integral dari bangsa Indonesia. Perlu diambil langkah-langkah kreatif dan berani yang berdimensi jangka panjang dan menyeluruh.

3.1 *Historical Justice of Papua*

Michael L. Marrus (2016) dalam "Official Apologies and the Quest for Justice" mengatakan bahwa 'historical justice' berkaitan dengan tindakan-tindakan tertentu yang dapat dikategorikan sebagai *"great wrong"* yang dilakukan oleh generasi tertentu dalam sejarah di masa lampau yang kejam atau tidak cukup memberikan rasa keadilan bagi generasi sekarang dan generasi berikutnya. Persoalan 'historical justice' merupakan issu akademis yang banyak diperbincangkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu, sebagaimana ditunjukkan dalam konferensi internasional (2003) bertajuk "Historical Justice in International Perspective: How Societies Are Trying to Right The Wrongs of The Past". [2] Para pakar interdisipliner itu mengungkap berbagai kejadian dan tindakan yang salah di masa lampau dan mengusulkan beberapa jalan keluar, antara lain: memberikan restitusi *(restitutions),* repatriasi *(reparations),* kompensasi *(compensations),* rehabilitasi *(rehabilitations),* membentuk komisi kebenaran *(truth commissions),* dan meminta maaf secara resmi *(official apologies)*.

Studi ini menemukan kenyataan bahwa akar konflik yang dihadapi di tanah Papua memiliki sejarah yang cukup panjang, dimulai sejak proses dekolonisasi Papua dari Belanda (Dutch New Guinea), New York Agreement (1962), Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969, sampai kebijakan rejim Orde Baru (1967-1998).

Sejarah proses integrasi Irian Barat masuk ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak bisa dipisahkan dari dinamika politik

nasional maupun Internasional. Proses panjang untuk merebut Irian Barat dari kekuasaan Belanda telah mengerahkan segenap potensi negara yang tidak sedikit. Perjuangan diplomasi yang dipadukan dengan kekuatan militer menjadi faktor penentu dalam perebutan Irian Barat. Dalam konteks sejarah modern, perjuangan pembebasan Irian Barat tidak terlepas dari pengaruh konflik Perang Dingin antara ideologi Barat (kapitalisme) dengan ideologi Timur (komunisme). Dalam pengerahan kekuatan militer dalam Tri Komando Rakyat (Trikora) pembebasan Irian Barat, Indonesia mengandalkan persenjataan perang dari Blok Timur (Uni Soviet/Rusia) dan hal itu mencemaskan Blok Barat (Amerika Serikat) akan bahaya masuk dan bertumbuhnya paham komunis di Asia Tenggara.

Melalui tekanan Amerika Serikat, Belanda akhirnya menyerahkan Irian Barat (Papua) kepada Indonesia dengan menandatangani Perjanjian New York. Berdasarkan pasal 14 perjanjian tersebut, Belanda akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan atas Papua melalui perantaraan Perserikatan Bangsa Bangsa/UNTEA dan kemudian akan diteruskan kepada Indonesia.

Pada tahun 1964 orang asli Papua elite yang berpendidikan Belanda meminta bahwa Papua harus bebas tidak hanya dari Belanda tetapi juga dari Indonesia. Pemungutan suara "pilihan bebas" *(free choice)* yang diterapkan berdasarkan Perjanjian New York 1962 oleh PBB dilaksanakan pada tahun 1969 melalui projek yang disebut Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) dengan melibatkan lebih dari 1025 jiwa yang dipilih sebagai perwujudan dari "konsultasi" lokal (dari perkiraan jumlah penduduk pada saat itu sebanyak 800.000 jiwa). Padahal, sesuai dengan New York agreement pasal 18d, pemungutan suara dilakukan satu orang satu suara (one man one vote). Hal ini senantiasa menimbulkan keluhan-keluhan sejarah yang berakar dari perbedaan persepsi mengenai integrasi Irian Barat (Papua) ke dalam Negara Indonesia. Proses ini pulalah yang menimbulkan jenis konflik dan kekerasan yang pertama di bumi Papua, yaitu konflik dan kekerasan 'politik' antara orang Papua dengan otoritas pemerintah RI, khususnya tentara melalui pendekatan keamanannya.

Saat ini sudah dipublikasikan banyak buku yang menggugat kekerasan politik yang berakar dari status politik dan sejarah integrasi Papua yang tidak sesuai dengan perjanjian New York (Yoman, 2007; Wonda, 2009; Yoman 2012; dan Giyai, 2013). Perjanjian New York merupakan sebuah perjanjian yang diprakarsai oleh Amerika Serikat pada 16 Agustus 1962 yang menghasilkan kesimpulan, antara lain: (1) Belanda akan menyerahkan kekuasaan pemerintahan Papua bagian barat kepada United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA), yang didirikan oleh Sekretaris Jenderal PBB. UNTEA kemudian akan menyerahkan pemerintahan kepada Indonesia. (2) Bendera PBB akan dikibarkan selama masa peralihan; (3) Pengibaran bendera Indonesia dan Belanda akan diatur oleh perjanjian antara Sekretaris Jenderal PBB dan masing-masing pemerintah; dan (4) UNTEA akan membantu polisi Papua dalam menangani keamanan. Tentara Belanda dan Indonesia berada di bawah Sekjen PBB dalam masa peralihan. Pemerintah Indonesia berpegang pada New York Agreement sebagai dasar hukum internasional yang menjamin wilayah Papua bagian dari Indonesia karena lewat hukum inilah proses pengembalian Papua Barat oleh Belanda kepada Indonesia. Selanjutnya lewat hukum ini pula Pepera yang terlaksana 1969 mendapat pengakuan 84 negara.

Mengapa Perjanjian New York ini menjadi salah satu pemicu konflik di Papua? Hal ini berkaitan dengan 'historical justice' yang disinggung sebelumnya. Seperti sudah banyak terungkap di berbagai media massa, kedua produk hukum ini ditolak masyarakat Papua karena dianggap cacat dan tidak etis. Perjanjian New York terutama dianggap illegal dan cacat karena sama sekali tidak melibatkan orang Papua sendiri di dalam perjanjian tersebut. Penduduk pribumi seharusnya memiliki hak menentukan nasibnya sendiri. Selanjutnya Pepera juga ditolak karena terbukti bahwa dilaksanakan di bawah ancaman, intimidasi, pembunuhan sadis. Dua produk hukum yang cacat ini menjadi pemicu protes, perlawanan, dan perjuangan masyarakat Papua untuk menuntut kemerdekaan bagi tanahnya. Mereka menuntut PBB untuk mencabut Resolusi PBB Nomor 2504 tanggal 19 Desember 1969 yang mengesahkan hasil Pepera.

Sejak awal, Papua bukan bagian integral Negara Kesatuan RI (NKRI). Sebelum 'berintegrasi' dengan NKRI di tahun 1969, Papua adalah wilayah jajahan Belanda, yang disebut Dutch New Guinea. Papua diklaim 'berintegrasi' dengan NKRI di tahun 1969, dua puluh empat tahun setelah NKRI diproklamasikan.

Dalam bukunya yang berjudul *Otonomi Khusus Papua Telah Gagal,* Yoman (2012) kembali mempersoalkan status politik dan sejarah integrasi

sebagai akar masalah kekerasan di Papua. "Pelaksanaan PEPERA 1969 yang penuh dengan kejahatan kemanusiaan tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum internasional" (hlm. 7). Dalam buku ini, berbagai kekerasan yang disebutnya sebagai "pemusnahan etnis Papua" diulas secara lebih detil. Disebutnya ada berbagai strategi pemusnahan etnis Papua, seperti operasi militer, operasi transmigrasi, arus imigran, program KB, minuman keras, penyakit HIV/AIDS, pemusnahan kebudayaan, sejarah, dan rekayasa 'perang suku" seperti yang terjadi di Timika. Berbagai kasus kekerasan kemanusiaan dan penangkapan bahkan mencuat gejala pemusnahan etnis Papua diungkapnya dengan jelas.

Sebagaimana disebutkan Nato Gobay (Kira, 2014: 11), rakyat Papua menganggap bahwa *Act of Free Choice 1969*, yang diubah di Indonesia menjadi Musyawarah Penentuan Pendapat Rakyat (PEPERA) sebagai realisasi dari *New York Agreement* 1962 merupakan bentuk kongkrit pengabaian dunia internasional dan pemerintah Indonesia atas hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri. Proses penyusunan *New York Agreement* sama sekali tidak melibatkan orang Papua. PEPERA dijalankan di bawah proses penuh intimidasi, larangan berkumpul dan berbicara, penghilangan orang, pembunuhan dan berbagai bentuk tindakan militer yang menistai demokrasi. Seluruh aktivitas yang menjauhkan orang Papua dari realisasi haknya untuk menentukan nasib sendiri, dalam pandangan orang Papua jelas-jelas melanggar kententuan Resolusi PBB No. 1514 tentang proses dekolonisasi bagi bangsa-bangsa yang dijajah.

Penyelesaian konflik dan kekerasan di papua secara adil dan berdampak permanen hanya dapat dilaksanakan jika masyarakat Papua memperoleh 'historical justice'. Kesalahan-kesalahan di masa lampau, terutama konstruksi dasar hukum yang cacat perlu ditinjau kembali. Jika ditemukan kesalahan yang fatal, seharusnya dilaksanakan koreksi dengan sikap kenegarawanan yang elegan.

3.2 Memoria Passionis

Istilah *memoria passionis* (Latin), berarti ingatan penderitaan. Ingatan penderitaan membuat sebuah bangsa mengambil tindakan tertentu. Geiko Muller-Fahrenholz dalam artikelnya "Nein to War – Why Germans Oppose A Strike On Iraq" yang dimuat di *Christian Century* (22/2/2003) mengatakan, landasan moral penolakan Jerman untuk terlibat dalam Perang di Irak adalah *memoria passionis* atau ingatan penderitaan bangsa Jerman sendiri dalam Perang Dunia II. Menurut Geiko, sampai sekarang hampir semua keluarga di Jerman masih menyimpan ingatan penderitaan akan PD II. Kanselir Gerhard Schoder sendiri kehilangan ayahnya dalam PD II. Belum lagi Peristiwa Auschwitz yang dikenang dunia sebagai simbol kegilaan genosida NAZI dan spiral kekerasan yang menodai perjalanan sejarah bangsa Jerman. Ingatan penderitaan itu membentuk komitmen bangsa Jerman untuk membangun pilihan politik dari perspektif penderitaan.

Di bidang karya sastra, banyak ditulis karya yang mengusik ingatan (*Gegen das Vergessen*) tentang masa silam bangsa Jerman yang kelam, terutama tentang rezim Nazi, Perang Dunia II, serta pengaruh dan akibatnya hingga sekarang (Elisabeth Korah-Go dan Hesdanina Damly, 2003). Karya-karya pemenang nobel sastra 1999 Guenter Grass seperti *Im Krebsgang* dan *Die Blechtrommel*, misalnya, membahas penderitaan fisik dan luka batin bangsa Jerman yang diakibatkan oleh Perang Dunia II. Karya-karya sastra jenis *memoria passionis* ini, seperti dikatakan Johann B. Metz, turut menghadang era amnesia budaya *(the age of cultural amnesia)*. Lebih dari itu, sastra secara aktif ikut meneriakkan *the future of never again*. Bangsa Jerman mengenang dan belajar dari sejarah untuk tidak mengulanginya lagi.

Gagasan tentang *"memoria passionis"* membuka perspektif kita untuk merefleksikan perjalanan sejarah Papua yang banyak ternoda oleh berbagai penderitaan fisik dan luka batin yang tidak menemukan solusinya. Studi ini menemukan bahwa masyarakat Papua menyimpan begitu banyak ingatan penderitaan, dimulai dari proses integrasi yang tidak mulus. Dalam buku *Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua,* Socrates Sofyan Yoman (2007) mengungkapkan berbagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikatakan "sudah begitu kronis dan sistematik di tanah Papua". Yoman mengungkap berbagai operasi militer terhadap rakyat Papua sejak pemerintah menjadikan Papua sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Menurutnya, "Operasi Militer dan Operasi Transmigrasi menunjukkan indikasi yang tidak diragukan lagi dari maksud dan tujuan untuk menghilangkan Ras Melanesia di tanah Papua" (hlm. 143).

Sendius Wonda (2009) dalam buku *Jeritan Bangsa: Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan* mengungkapkan dengan jelas sejarah dan proses integrasi Papua ke dalam NKRI yang tidak fair dan penuh rekayasa. Dia pun menegaskan bahwa pendudukan Indonesia adalah awal dari tragedi kemanusiaan bangsa Papua Barat. Segera setelah Pepera, kekerasan dan pembantaian terhadap tokoh-tokoh 'berbahaya' Papua dilaksanakan tanpa pandang bulu.

Melalui buku dengan judul yang menohok, *Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua,* Filep Karma (2014) mengungkap penderitaan batin orang Papua yang merasa dilecehkan sebagai 'manusia setengah binatang'. Karma dipandang banyak orang Papua sebagai Santo, orang suci, yang siap memberikan apa saja untuk aksi damai agar negerinya merdeka. Dia pernah dipukul, ditembak, dan berkali-kali dipenjara serta diancam bunuh. Buku itu menjelaskan 52 tahun salah penanganan Papua Barat oleh pemerintah Indonesia. Faktanya, hingga hari ini, orang Papua Barat diperlakukan 'setengah binatang' di seluruh pelosok negeri, dari Jayapura hingga Wamena di Pegunungan Tengah. Laki-laki dan perempuan ditangkap saat operasi 'pembersihan', atau operasi polisi di jalan atau saat protes biasa atas hak-hak asasi mereka. Mereka dipenjara, disiksa, dibunuh secara acak.

Dalam buku yang berisi kesaksian memoria passionis itu, Karma menceritakan berbagai kisah memilukan tentang kekejaman di luar batas nalar yang dilakukan tentara Indonesia. Perhatikan, misalnya kesaksian Tinneke Rumakabu dalam sebuah pengadilan warga tentang Pembantaian Biak di Universitas Sydney (6 Juli 2003) sebagai berikut.

> Saya melihat seorang pria memperlihatkan kami satu pisau kecil, pisau yang biasa kau pakai bercukur, lantas ia bilang, 'Kita akan pakai ini untuk memotong vagina kalian, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan.' Saya menyaksikan seorang anak perempuan, mereka memperkosanya dan lantas ia tewas. Darah berceceran di mana-mana karena vagina perempuan dan klitorisnya dipotong serta diperkosa berulang kali. Mereka juga memukuli perempuan lainnya dengan bayonet dan lantas memotong leher juga payudara perempuan tersebut (Karma, 2014: xi).

Membaca, mendengarkan, memahami konflik batin dan penderitaan fisik orang Papua dalam berbagai kesaksian menyadarkan kita tentang kesalahan pendekatan yang dilaksanakan di tanah Papua. Kemerdekaan tanpa bebas dari rasa takut, penderitaan, tekanan, dan ancaman kekerasan merupakan kemerdekaan semu. Perjuangan setiap manusia dan setiap bangsa adalah mewujudkan kemerdekaan sejati sebagai manusia yang memiliki hak-hak azasinya sebagai manusia. Karya-karya memoria passionis orang Papua perlu disosialisasikan melalui berbagai media, termasuk media sosial dan elektronik untuk mengusik ingatan *Gegen das Vergessen*.

3.3 *Reconstruction of Papuan Identity*

Identitas budaya adalah sebuah *self-perception* atau *self-conception* individu sebagai bagian dari sebuah kelompok, yang berkaitan dengan rasa nasionalisme, etnisitas, agama, kelas sosial, generasi, lokalitas, atau kelompok budaya tertentu. Karena itu, istilah identitas budaya seringkali tumpang tindih dengan istilah identitas politik. Identitas selalu berkaitan dengan narasi besar yang diciptakan. Bagaimanakah identitas budaya orang Papua?

Narasi tentang Papua yang diterima dan dimengerti oleh sebagian besar orang Indonesia adalah narasi tentang proses integrasi yang relatif mulus, yang disahkan oleh PBB. Oleh karena itu, sejak integrasi itu disahkan, pemerintah Indonesia memiliki hak penuh membangun Papua 'sebagai bagian dari bangsa Indonesia' menurut persepsi dan pendekatan yang dipilihnya sendiri. Proses pendekatan pembangunan Papua pun dimulai dengan sejarah kekerasan, karena keberadaan Indonesia di Papua diawali dengan penetapan Papua menjadi Daerah Operasi Militer (DOM) untuk menunjang kebijakan pembangunan yang bertumpu pada strategi pertumbuhan ekonomi melalui pertambangan, hak penguasaan hutam (HPH), transmigrasi, pariwisata, dan berbagai proyek pembangunan lainnya. Militer pun melakukan pelarangan pengibaran bendera Bintang Kejora, dan pembungkaman (bahkan pembunuhan) tokoh-tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan menjadi tindakan dan pendekatan yang seolah-olah sah dan legal.

Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada strategi pertumbuhan ekonomi itu berimplikasi pada aspek sosial budaya seperti perusakan lingkungan hidup, pengambilan tanah, penebangan hutan, pengrusakan dusun-dusun masyarakat, serta degradasi kebudayaan masyarakat setempat.

Proses integrasi yang tidak mulus itu, ditambah lagi dengan pendekatan pembangunan yang militeristik dan eksploatif menciptakan krisis identitas bagi orang Papua. Krisis identitas nampak dalam aspek kebudayaan, ekonomi, birokrasi pemerintahan, dan sebagainya. Maka muncul tuntutan untuk menghormati kebudayaan, pengembangan kebudayaan Papua Melanesia, Papuanisasi birokrasi, penguasaan sumber daya ekonomi, maupun tuntutan agar pemerintah mengakui keberadaan lembaga adat.

Sejak tahun 2007, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menegaskan pentingnya menghormati hak-hak masyarakat adat *(indigenius people)*. Mengadopsi kebijakan-kebijakan ILO (International Labor Organisation), PBB telah mendeklarasikan hukum perlindungan terhadap kaum minoritas dan subaltern di negara-negara bekas jajahan. Masyarakat adat perlu memiliki hak politik sebagai hak asasinya untuk kepentingan *self determination.* Bagi orang Papua, masyarakat adat selalu berkaitan dengan identitas, harga diri, dan eksistensinya (Giyayi, 2013). Hampir semua orang asli Papua memahami dan meyakini dirinya sebagai bagian dari masyarakat adat. Ada dugaan, negara justru memarginalisasikan sistem adat itu.

Identitas dibentuk lewat penandaan perbedaan *(the making of difference)*. Identitas sangat tergantung pada perbedaan yang dikukuhkan dalam sistem klasifikasi kelompok sosial (Woodward, 1997). Klasifikasi sosial dibuat dalam prinsip oposisi biner, di mana populasi dibagi menurut berbagai karakteristik yang mereka miliki, sehingga mereka berbeda dan terpisah dari kelompok lainnya.

Stuart Hall (dalam Barker, 2000) membedakan dua jenis identitas, yaitu (1) identitas yang berasal dari diri subjek sendiri, yaitu bagaimana subjek memahami keberadaan dirinya, dan (2) identitas yang didapatkan dari pandangan orang lain tentang diri subjek, yaitu pelabelan sosial yang diterimanya dari dunia di mana dia berada. Jenis identitas yang kedua ini memaksa subjek melakukan penyesuaian-penyesuaian, sehingga identitas dipahami sebagai proses sosialisasi atau akulturasi.

Konstruksi identitas dalam dunia sosial dilandasi pada perbedaan-perbedaan. Perbedaan hanya dapat dipahami bila dilekatkan pada pasangan oposisinya yakni persamaan-persamaan. Dari pemahaman inilah, subjek mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian atau bukan bagian dari kelompok tertentu, sebagai orang dalam (*insider*) atau orang luar (*outsider*). Persamaan dan perbedaan menentukan sistem makna yang dibangun dan dihayati bersama (*shared meaning system*) yang disebut budaya (Woordward, 1997).

Identitas, menurut Hall (William dan Chrisman, 1994), pada akhirnya bukan lagi soal esensi tetapi soal pemosisian diri *(positioning of the self)*. Mencari identitas Papua atau kepapuaan bukanlah hal yang mudah. Identitas mengacu pada tiga pengertian: 1) identitas budaya *(cultural identity)* (hasil budaya atau etnik tertentu, padahal di Papua terdapat lebih dari 200 kelompok etnik); 2) identitas etnik *(ethnic identity)* (umumnya berbasis budaya, yang ditandai oleh bahasa dan adat-istiadat) sedangkan di Papua tidak hanya satu bahasa dan tradisi adat-istiadat yang sama; dan (3) identitas rasial *(racial identity)* pada umumnya diukur dengan dasar fisik seperti warna kulit, jenis rambut, dan struktur wajah. Identitas rasial masyarakat Papua adalah ras Melanesia; (4) identitas agama *(religious identity)* (mayoritas ras Melanesia beragama Kristiani); *socioeconomic identity* (mayoritas ras Melanesia bermata pencaharian petani), dan (5) identitas kebangsaan national *(ethnonationalism)*: bangsa Papua telah memiliki bendera Bintang Kejora, Lagu Kebangsaan *(national anthem)* Hai Tanahku Papua, dan banyak yang bersikukuh mempertahankan pandangan bahwa Papua sudah merdeka sejak 1961.

Perhatikan identitas rasial dalam teks lagu berikut ini.

Aku Papua
Franky Sahilatua

Tanah Papua tanah yang kaya
Surga kecil jatuh ke bumi
Seluas tanah sebanyak batu
Adalah harta harapan

Tanah papua tanah leluhur
Di sana aku lahir
Bersama angin bersama daun
Aku dibesarkan

Hitam kulit keriting rambut
Aku Papua

Penegasan identitas rasial dalam teks lagu ini tentu bermaksud mendukung identitas dominan orang Papua sebagai ras Melanesia. Hal itu menjadi bagian

yang penting dalam membangun pengertian yang benar tentang identitas mereka.

Perhatikan identitas sosial budaya dalam teks lagu ini.

Tanah Papua
Trio Ambisi

Di sana pulauku
Yang kupuja s'lalu
Tanah Papua pulau indah
Hutan dan lautmu
Yang membisu s'lalu
Cendrawasih burung emas

Reff :
Gunung-gunung, lembah-lembah
Yang penuh misteri
Kan ku puja s'lalu
Keindahan alammu yang mempesona
Sungaimu yang deras mengalirkan
emas
Syo.. Ya Tuhan..Trima..kasih

Identitas sosial dan budaya dibentuk dalam relasi antara individu dengan norma-norma sosial. Dalam studi Foucault terhadap orang gila, sejarah penyimpangan seks, terungkap bahwa individu dibentuk berdasarkan wacana para pakar yang berwewenang menetapkan seseorang sebagai normal atau tidak, sesuai norma atau melawan norma.

Burung Cendrawasih merupakan burung khas Papua dan menjadi ikon Pulau Papua. Universitas Negeri yang terkenal di Jayapura diberi nama Universitas Cendrawasih. Dapat dikatakan, burung yang memiliki bulu-bulu yang sangat indah ini telah menjadi bagian dari Papua. Karena itu, legenda ini perlu diajarkan pada anak-anak Papua.

Sudah ratusan tahun penduduk Papua hidup dalam keberagaman. Perang antarsuku tentu pernah terjadi di bumi Papua, namun mereka selalu memiliki kearifan lokal untuk mengatasi dan membangun budaya harmonis di antara mereka, misalnya dengan upacara "bakar batu", denda, dan berbagai tindakan ritual lainnya.[3]

Dalam perspektif budaya, papuanisasi diharapkan memberikan ruang gerak, penghargaan dan pengakuan bagi identitas sosial budaya Papua. Hal ini sangat penting mengingat struktur dan komposisi orang yang tinggal di Papua sudah demikian beragamanya. Negara diharapkan mampu mengakomodasi secara terbuka simbol-simbol dan ekspresi budaya Papua sebagai bagian dari kekayaan budaya Indonesia. Inkorporasi elemen budaya di dalam kehidupan dan proses sosial budaya penting untuk membuat orang Papua merasa mendapatkan arena di dalam rumah bhinneka Indonesia. Data kuantitatif menunjukkan bahwa orang asli Papua tengah menghadapi perubahan yang radikal secara demografis. Pada 1959 persentase pendatang masih kurang dari 2%, menjadi 4% pada 1971, dan menjadi lebih dari 35% pada 2000. Pada 2005 diperkirakan penduduk pendatang menjadi 41% dan melonjak menjadi 53,5% pada 2011. Tidak lama lagi orang asli Papua menjadi minoritas di tanah Papua (Tim Peneliti LIPI).

Sebelum komposisi penduduk pendatang sebesar sekarang ini, pendatang (transmigrasi dan migrasi spontan) secara kualitatif memang sudah lebih unggul dan orang asli Papua sudah termarjinalisasi. Dalam bidang pertanian, transmigran dan pendatang lainnya lebih produktif dan menguasai pasar. Di sektor perdagangan, di pasar-pasar, pedagang Papua diwakili mama-mama yang menjual hasil kebunnya di pinggiran pasar dengan omzet yang sangat kecil dan rawan penggusuran. Contoh ini bisa diperpanjang di sektor jasa dan lain- lain yang didominasi oleh pendatang. Sebagian besar pendatang relatif lebih berpengalaman dan berpendidikan daripada orang asli Papua. Kekalahan bersaing dan marjinalisasi menumbuhkan perasaan kolektif orang asli Papua bahwa eksistensi mereka sebagai tuan di tanah Papua benar-benar terancam. Di kalangan elitnya, kenyataan ini dipertajam dengan wacana yang dramatis bahwa orang Papua sedang terancam kepunahan atau bahkan *slow motion genocide.*

Identitas orang asli Papua juga diilhami oleh pengalaman sejarah di mana orang Papua tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan yang menentukan masa depan mereka. Sejak kemelut dekolonisasi Papua dari tangan Kolonial Belanda, Pepera 1969, dan kurun sejarah Orde Baru, seperti yang diwakili oleh pernyataan Chauvel di atas, orang Papua merasa selalu tidak dilibatkan dalam proses politik penentuan nasib dan masa depan mereka. Menjawab hal itu, Wakil Gubernur Papua R.G. Djopari pada 2000 pernah menegaskan bahwa papuanisasi perlu dilakukan dengan tujuan agar 'rakyat Papua

mampu mengurus diri sendiri dan memiliki kebebasan luas untuk menguasai dan membangun daerah sendiri'. Kehendak ini kemudian diperkuat dengan hadirnya UU Otsus No 21/2001 yang menekankan pemberdayaan penduduk 'pribumi' Papua. Isu sentralnya di sini adalah pengabaian suara dan partisipasi orang asli Papua.

Papua dalam pengertian yang lebih sempit. Persaingan antar-suku sesama orang asli Papua dengan watak 'etnosentrisme sempit' semakin menajam. Dikotomi tidak hanya memanipulasi oposisi gunung-pantai, tetapi juga antarsuku dalam unit sosial tradisional yang lebih kecil lagi. Identitas kepapuaan dan kebersamaan sebagai sesama orang asli Papua seperti yang terlihat pada 1999 dan 2000-an dinilai telah hilang. Dalam praktik kekuasaan, para pejabat Papua cenderung menampilkan diri bukan sebagai aparat birokrasi moderen yang melayani kepentingan publik tapi lebih sebagai *big man* atau patron yang menggunakan uang negara untuk menjaga loyalitas konstituennya yang biasanya juga anggota suku atau klennya sendiri. Wacana pemekaran sebagai perbaikan pelayanan publik ternyata hanya berfungsi sebagai topeng bagi kepentingan sempit untuk menguasai sumber daya politik dan birokrasi di tingkat lokal yang pada gilirannya mengorbankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Salah satu wujud penting rekognisi orang asli Papua adalah pembentukan lembaga unik Majelis Rakyat Papua (MRP). Anggotanya dipilih secara eksklusif dari kalangan orang asli Papua, yakni dari lembaga-lembaga adat, keagamaan, dan perempuan. Tugas pentingnya adalah melindungi hak-hak dasar orang asli Papua dan menyuarakan kepentingan orang asli Papua yang terkait dengan adat, tanah ulayat, keagamaan, dan pemberdayaan perempuan (Pasal 23 UU Otsus 21/2001). MRP juga memiliki tugas penting agar identitas dan kebudayaan Papua memberi warna utama dalam proses dan produk politik, ekonomi, dan sosial-budaya sehingga perubahan di Papua dapat dilakukan dengan melibatkan orang Papua secara signifikan dalam semangat dan cara Papua. Sejak pembentukannya pada 2005 hingga 2008, MRP belum secara signifikan menunjukkan kinerjanya yang terkait dengan harapan-harapan di atas.

Konstruksi identitas orang asli Papua pada hakekatnya adalah politik identitas yang lazim disebut sebagai kebijakan afirmatif yang biasanya ditujukan untuk kelompok marjinal yang tidak atau sedikit memiliki sumber daya lain sebagai modal untuk memperjuangkan kepentingannya selain identitas etnisnya. Di dalam konteks persaingan dalam perebutan sumber daya, ketidakadilan sejak awal dialami orang Papua karena kondisi struktural dan kultural orang Papua yang belum memiliki habitus yang memungkinkan persaingan yang setara. Membiarkan orang Papua tersingkir dalam persaingan semacam ini adalah suatu ketidakadilan. Oleh karena itu kebijakan afirmatif yang berdasarkan identitas etnis diperlukan untuk melindungi orang asli Papua dari persaingan yang aturan mainnya belum terumuskan dengan baik.

4. KESIMPULAN

Jika dipetakan, pelaku dan korban konflik, kekerasan, dan pembangunan di Papua dilakukan oleh dua kutub ekstrim (lihat Tim Peneliti LIPI, 2003). *Pertama,* pelaku dari kaum nasionalis Indonesia, misalnya, Depdagri, Badan Intelijen Negara (BIN), Desk Papua Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, fraksi-fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), dan badan negara lainnya. Selain pihak negara, terdapat pula kelompok paramiliter 'Satgas' yang berasosiasi dengan organisasi agama tertentu dan/atau kesatuan militer tertentu. *Kedua,* pelaku dari kalangan nasionalis Papua terdapat berbagai jenis kelompok yang menyebut diri Tentara Pembebasan Nasional/Organisasi Papua Merdeka (TPN/OPM), lalu Presidium Dewan Papua (PDP) dan panel-panelnya, serta kelompok nasionalis Papua lainnya yang tersebar di dalam dan di luar negeri. Akhir-akhir ini muncul komite aksi yang aktif berdemo seperti Front Persatuan Perjuangan Rakyat (Front Pepera) Papua Barat yang merupakan aliansi dari berbagai kelompok mahasiswa dan pemuda Papua yang tersebar di Indonesia dan didukung oleh kelompok Papua sejenis di Australia dan Inggris.

Pada sekitar 2008 muncul kelompok yang menyebut diri sebagai West Papua National Coalition for Liberation (WPNCL). Kelompok ini mengklaim sebagai suatu aliansi antara sayap politik dan sayap militer dari berbagai kelompok yang selama ini memperjuangkan kemerdekaan Papua. Kelihatannya, Presidium Dewan Papua (PDP) tidak masuk di

dalamnya. Di dalamnya terdapat nama Rex Rumakiek, John Otto Ondowame, dan lain-lain. Kelompok ini banyak melakukan kegiatannya di antara Vanuatu dan Australia. Selain itu muncul pula West Papua National Authority (WPNA). Di Australia WPNA dipimpin oleh Jacob Rumbiak dan Herman Wanggai. Di Provinsi Papua Barat kelompok ini dipimpin oleh 'Presiden Kongres Nasional' Terry Yoku, Frans Kapisa, dkk. Kelompok ini beberapa kali melakukan demo di Manokwari dan melakukan 'perlawanan' di Serui. Yang juga menonjol dan memiliki pendukung di kalangan pemuda asal pegunungan adalah kelompok Benny Wenda di Oxford Inggris yang sempat menarik perhatian pemerintah Indonesia karena membentuk International Parliamentarians for West Papua (IPWP) yang kemudian diikuti dengan International Lawyers for West Papua (ILWP).

Di antara dua kutub itu terdapat Dewan Adat Papua (DAP), lembaga keagamaan (Gereja Katolik dan Protestan, dan lembaga keagamaan lainnya), LSM, partai politik, organisasi kemasyarakatan (Ormas), serta kelompok berbasis suku- suku di Papua. Kalau peta elit politik Papua juga dimasukkan maka dinamikanya yang semrawut semakin terlihat. Kesemuanya ini menunjukkan banyaknya pelaku dan arena politik abu-abu. Untuk membuatnya sederhana, kalangan nasionalis Indonesia melabel kelompok abu-abu itu juga sebagai bagian dari 'kelompok separatis'. Dengan logika yang sama tapi untuk tujuan politik yang berbeda, pihak nasionalis Papua juga cenderung mencurigai kelompok abu-abu sebagai 'pro-,Jakarta'.

Upaya mati-matian dari kedua kubu mempertahankan posisinya masing-masing hanya akan melanggengkan sejarah konflik dan kekersasan di tanah Papua. Kedua kubu perlu mencari jalan untuk mengakhiri kekerasan dan konflik, dan berusaha membangun perdamaian abadi di tanah Papua. Untuk itu, ketiga jalan solusi yang ditawarkan dalam tulisan ini perlu menjadi bahan pertimbangan.

Pertama, masyarakat Papua perlu memperoleh *historical justice.* Fakta sejarah menunjukkan bahwa proses dekolonisasi dan integrasi Papua ke dalam NKRI tidak berjalan dengan mulus. Bahkan fakta-fakta membuktikan bahwa di masa lampau ditemukan bebragai kesalahan besar dan fatal. Beberapa jalan keluar dapat dipilih untuk segerra dilaksanakan, antara lain: memberikan restitusi *(restitutions),* repatriasi *(reparations),* kompensasi *(compensations),* rehabilitasi *(rehabilitations),* membentuk komisi kebenaran *(truth commissions),* dan meminta maaf secara resmi *(official apologies)*.

Kedua, *memoria passionis* orang Papua sudah menyebar ke berbagai belahan dunia. Pelanggaran HAM berat yang terjadi di Papua sudah tidak bisa ditutup-tutupi lagi dengan berbagai slogan seperti bela negara, keutuhan NKRI, wilayah NKRI dari Sabang sampai Merauke adalah harga mati, dan berbagai slogan laainnya. Karya-karya *memoria passionis* itu menggugah kesadaran semua orang untuk memperjuangkan terwujudnya penghormatan terhadap HAM. Karya-karya itu hendaknya juga menghentikan tindakan-tindakan pelanggaran HAM di tanah Papua.

Ketiga, *reconstruction of Papuan identity.* Orang Papua sendiri, melalui berbagai lembaga adatnya, telah merumuskankan identitas rasial mereka sebagai bangsa Melanesia (sebagai ras yang paling dominan). Hal ini harus diakui oleh berbagai kalangan. Akan tetapi, yang terjadi adalah sebbaliknya. Beberapa waktu yang lalu, pemerintah Indonesia menyelenggarakan Festival Budaya Melanesia di Kupang, dengan pemikiran bahwa orang NTT (dan juga orang Maluku) termasuk ras Melanesia. Selain tidak ada bukti yang akademis tentang hal ini, tindakan pemerintah ini dirasakan sebagai sebuah pelecehan terhadap identitas kepapuaan.

Kajian Tim LIPI menyebutkan pentingnya apa yang mereka sebut sebagai "Rekognisi orang asli Papua", yakni proses sosial di mana konsep papua dan kepapuaan menjadi pusat dan tujuan. Dalam studi ini digunakan istilah yang lebih umum (yang maknanya sama dengan rekognisi), yaitu: rekonstruksi identitas Papua dan kepapuaan, sebuah upaya untuk membangun kembali identitas dan jati diri, sekaligus harkat dan martabat orang Papua. Tim LIPI mengusulkan digunakan sebuah "strategi politik afirmatif", yaitu tindakan khusus (bila perlu melawan regulasi umum) yang bertujuan membantu orang Papua dalam melindungi dan mengembangkan sumber daya yang dimilikinya sehingga orang Papua mampu bernegoisasi dan memiliki daya tawar yang memadai dalam proses perubahan sosial yang cepat serta mengambil keuntungan yang adil untuk keberlangsungan hidupnya dan kesejahteraannya. Orang Papua sudah mencoba merumuskan identitas asli mereka sendiri dalam sejumlah pertemuan dan publikasi. Rumusan-rumusan identitas, seperti disebutkan di atas, merupakan bagian dari upaya membangun rasa

percaya diri dan rasa bangga, yang sangat diperlukan dalam pertumbuhan kemanusiaan yang adil dan beradab.

Kekerasan dan konflik di Papua memiliki karakteristik dan sejarah yang panjang. Solusi final dan permanen bagi Papua hanya dapat diciptakan melalui pengakuan terhadap hak-hak sejarah orang Papua. Memoria passionis orang Papua merupakan sebuah narasi yang menggugat kesadaran kemanusiaan semua orang untuk memberikan perhatian dan dukungan pada upaya pemanusiaan orang Papua. Upaya untuk merumuskan identitas orang Papua dapat dipandang sebagai tindakan afirmatif untuk menyelamatkan orang Papua dari intervensi dan persaingan bebas yang terjadi di tanah Papua. Karena itulah, studi ini mengajukan tiga startegi kebudayaan sebagai resplusi konflik dan kekerasan di Papua, yaitu: *(1) historical justice; (2) memoria passionis;* dan *(3) reconstruction of Papuan identity.*

DAFTAR PUSTAKA

Anderson, Benedict (ed.). 2001. *Violence and the State in Suharto's Indonesia.* Ithaca: Cornell Southeast Asia Program.

Carr, John E. dan Eng Kok Tan. 1976. "In Search of the True *Amok* as Viewed within the Malay Culture," dalam *American Journal of Psychiatry.*

Colombijn, Freek dan J. Thomas (eds.). 2002. *Roots of Violence in Indonesia: Contemporary Violence in Historical Perspective.* Leiden: KITVL Press.

Coppel, Charles (ed.). 2001. *Violence Conflict in Indonesia: Analysis, Representation and Solution.* Richmond: Curzon forthcoming.

Cribb, Robert. 1991. *Gangsters and Revolutionaries: The Jakarta People's Militia and the Indonesian Revolution 1945-1949.* Sydney: Allen and Unwin.

Elisabeth, Adriana, Cahyo Pamungkas, Muridan S. Widjojo, Rucianawati, Sinnal Blegur, 2004. *Agenda dan Potensi Damai di Papua.* Jakarta: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Giyayi, John. 2013. *Memahami papua: Dinamika Politik Identitas dan Kearifan Lokal Bangsa Papua.* Jakarta: Cermin Papua dan Emidai.

Kapila, Mukesh. 2012. *Conducting Conflict Assessments: Guidance Notes.* Department for International Development (DFID).

Karma, Filep. 2014. *Seakan Kitorang Setengah Binatang: Rasialisme Indonesia di Tanah Papua.* Jayapura: Deiyai.

Kira, Biru. 2014. *Berlayar ke Timur Menuju Gereja Kontekstual di Tanah Papua.* Yogyakarta: Kanisius.

Marrus, Michael L. 2016. Official Apologies and the Quest for Justice. Toronto: Munck Center for International Studies.

Muriddan S. Widjojo. 2001. "Di Antara Kebutuhan Demokrasi dan Kemenangan Politik Kekerasan: Konflik Papua Pasca Orde Baru". Makalah seminar "Proyek Penelitian Transisi Demokrasi di Indonesia."Jakarta: LP3ES dan The Ford Foundation.

Pattipi, J. 1993. *Etnografi Irian Jaya: Panduan Sosial Budaya (Buku Satu)*. Irian Jaya: Kelompok Peneliti Etnografi.

Peursen, CA van. 2005. *Strategi Kebudayaan.* Yogyakarta: Kanisius.

Pigay, Decki Natalis. 2000. *Evolusi Nasionalisme dan Sejarah Konflik Politik di Papua.* Jakarta: Sinar Harapan.

Robinson, Geoffrey. 1995. *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali.* Ithaca and London: Cornell University Press.

Yoman, Socratez Sofyan. 2007. *Pemusnahan Etnis Melanesia: Memecah Kebisuan Sejarah Kekerasan di Papua Barat.* Yogyakarta: Galang Press.

Yoman, Socratez Sofyan. 2012. *Otonomi Khusus Papua Telah Gagal.* Jayapura: Cendrawasih Press.

Waranmi, Hugo. 2010. *Getaran Tanah Papua.* Yogyakarta: Kepel.

Wessel, Inggrid dan Georgia Wimhöfer (eds.), 2001. *Violence in Indonesia.* Hamburg: Abera.

Wonda, Sendius. 2009. *Jeritan Bangsa, Rakyat Papua Barat Mencari Keadilan.* Yogyakarta: Galang Press.

CATATAN AKHIR

[1] Versi awal makalah ini sudah dipresentasikan pada Internasional Conference on Multidisciplinary Research (ICMR) 2015, diselenggarakan oleh Universiti Sains Malaysia (USM) Pulau Pinang, Malaysia, 19–21 Agustus 2015.

[2] "Historical Justice In International Perspective: How Societies Are Trying To Right The Wrongs Of The Past" International Conference at the GHI, March 27-29, 2003, yang dimuat dalam GHI BULLETIN NO. 33 (FALL 2003).

[3] Keprihatianan awal yang memicu penelitian ini adalah terjadinya konflik dan perang suku berkepanjangan di Papua, yang terpublikasikan melalui berbagai media. Akan tetapi, setelah mendalami karakteristik pertang suku itu, saya berpikir bahwa orang Papua sudah menyiapkan solusi sesuai dengan kearifan local mereka. Seperti dicatat Muridan (2001), Kekuatan orang Papua pada umumnya adalah kemampuan negosiasi di dalam konflik antarkelompok. Institusi resolusi konflik secara tradisional berkembang dan digunakan untuk mengakhiri suatu krisis hubungan antar kelompok. Tradisi negosiasi, terutama di kalangan orang pegunungan, digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus pembunuhan, perzinahan, pencurian, dan lain-lain. Perang suku atau jalan kekerasan baru diambil ketika negosiasi mengalami kebuntuan atau pihak yang bertikai memang secara kultural merupakan "musuh" permanen. Hanya saja mekanisme ini hanya berlaku di dalam intern kelompok suku. Di dalam konflik antar suku kecenderungan untuk mengambil jalan kekerasan masih sangat kuat.